

**PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI PENGADILAN AGAMA
DAN PENGADILAN NEGERI**

Muhammad Rafil Fadhli
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Correspondence

Email: Rafilfadhli17@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 8 December 2023

Accepted: 17 December 2023

Published: 18 December 2023

Abstract

The resolution of divorce disputes through Religious Courts and District Courts is a complex legal process involving specific aspects. Religious Courts focus on family and religious law, considering religious principles in their judgments. Conversely, District Courts handle divorces with reference to positive and general law. The process involves hearings, mediation, and careful presentation of evidence. Religious Courts often emphasize religious values, while District Courts tend to prioritize legal aspects. The choice of legal path depends on the preferences and needs of the disputing parties. Although both have distinct roles, the final decision can impact the personal and family legal aspects of those involved in the divorce process.

Keyword : Divorce Dispute Resolution; Religious Courts; District Courts

Abstrak

Penyelesaian sengketa perceraian melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan proses hukum yang kompleks dan melibatkan aspek-aspek tertentu. Pengadilan Agama berfokus pada hukum keluarga dan agama, mempertimbangkan prinsip-prinsip agama dalam putusannya. Di sisi lain, Pengadilan Negeri menangani perceraian dengan mengacu pada hukum positif dan umum. Proses ini melibatkan sidang, mediasi, dan bukti-bukti yang harus disajikan dengan cermat. Pengadilan Agama sering menekankan pada nilai-nilai keagamaan, sementara Pengadilan Negeri cenderung mengutamakan aspek legal. Pemilihan jalur hukum ini tergantung pada preferensi dan kebutuhan pihak yang bersengketa. Meskipun keduanya memiliki peran masing-masing, keputusan akhirnya dapat memengaruhi kehidupan pribadi dan hukum keluarga para pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Perceraian; Pengadilan Agama; Pengadilan Negeri Psikologis

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perceraian melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri melibatkan dinamika kompleks yang mencakup aspek hukum, agama, dan kehidupan pribadi. Perceraian merupakan situasi sulit yang dapat berdampak pada berbagai lapisan kehidupan individu dan masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap latar belakang masalah ini penting untuk merinci kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam proses hukum ini.

Pertama, masalah perceraian menunjukkan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Tradisi dan norma yang melingkupi institusi pernikahan mengalami transformasi signifikan. Pergeseran pandangan terhadap peran gender, tanggung jawab keluarga, dan ekspektasi terhadap perkawinan mempengaruhi kestabilan hubungan suami istri. Pemahaman ini menciptakan landasan bagi munculnya perselisihan yang memerlukan intervensi hukum.¹

Kedua, aspek agama menjadi faktor krusial dalam konteks penyelesaian sengketa perceraian. Pengadilan Agama, sebagai lembaga hukum yang berfokus pada prinsip-prinsip agama, terlibat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum keluarga sesuai dengan ajaran agama yang bersangkutan. Keberadaan norma-norma agama menjadi titik sentral dalam proses

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 55

pengambilan keputusan, seringkali memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana keadilan hukum dapat sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.

Perubahan sosioekonomi juga berdampak pada pola kehidupan keluarga dan, oleh karena itu, meningkatkan kemungkinan timbulnya perselisihan perceraian. Tekanan ekonomi, mobilitas pekerjaan, dan perubahan pola karier dapat menyebabkan konflik dalam hubungan suami istri. Hal ini dapat menciptakan kondisi di mana para pihak merasa kesulitan mempertahankan kestabilan rumah tangga mereka, memicu permintaan perceraian.

Keempat, isu-isu terkait anak menjadi bagian sentral dalam sengketa perceraian. Pertentangan mengenai hak asuh, nafkah, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak seringkali menjadi puncak dari konflik perceraian. Pengadilan, baik Agama maupun Negeri, perlu mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak dalam pengambilan keputusan, menciptakan dinamika tambahan dalam penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, munculnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan pada sengketa perceraian. Hubungan online, media sosial, dan akses mudah terhadap informasi memainkan peran penting dalam dinamika hubungan suami istri. Selain itu, bukti elektronik seperti pesan teks dan email dapat menjadi faktor penentu dalam persidangan, memunculkan pertanyaan etika dan privasi.

Penekanan pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender juga mencuat dalam konteks penyelesaian sengketa perceraian. Perubahan paradigma tentang hak-hak individu dan perlindungan terhadap perempuan dalam hukum keluarga menciptakan tekanan pada sistem peradilan untuk menyelaraskan keputusan dengan prinsip-prinsip kesetaraan.²

Dalam ranah psikologis, proses perceraian dapat menciptakan dampak kesehatan mental dan emosional yang signifikan pada pihak yang terlibat. Stigma sosial terkait dengan perceraian, serta beban psikologis yang terkait dengan kegagalan pernikahan, dapat memperburuk kondisi kesejahteraan mental. Pengadilan perlu mempertimbangkan aspek ini dalam merumuskan keputusan, terutama ketika menyangkut aspek-aspek seperti nafkah dan hak asuh anak-anak.

Menciptakan panggung kompleks di mana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri harus beroperasi. Diperlukan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap perubahan kontekstual dalam masyarakat. Selain itu, keberlanjutan pengembangan hukum keluarga dan mekanisme penyelesaian sengketa perceraian perlu terus dipertimbangkan agar dapat mengakomodasi dinamika yang terus berkembang di tingkat sosial, budaya, dan teknologis. Berangkat dari latar belakang tersebut menjadi sebuah permasalahan yaitu pertama, bagaimana perubahan nilai sosial memengaruhi penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama dan Negeri?; kedua, apa dampak faktor ekonomi dan teknologi terhadap sengketa perceraian, serta bagaimana respons Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika penyelesaian sengketa perceraian melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.³ Metode wawancara akan digunakan untuk mendapatkan pandangan langsung dari pihak yang terlibat dalam proses perceraian, hakim, advokat, dan pihak terkait lainnya. Pengumpulan data juga melibatkan analisis dokumen hukum, seperti putusan pengadilan dan catatan sidang. Selain itu, observasi partisipatif akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman kontekstual dalam pengaturan pengadilan. Data kualitatif ini akan dianalisis secara

² Salim H. HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013. hlm, 79

³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. cetakan ke 4, 2008. hlm, 31

tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan dinamika yang muncul. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berperan dalam menyelesaikan sengketa perceraian di tengah perubahan nilai sosial, faktor ekonomi, dan dampak teknologi informasi.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Perubahan Nilai Sosial Memengaruhi Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Negeri

Perubahan nilai sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Aspek ini merentang dari evolusi pandangan terhadap institusi pernikahan hingga perubahan dinamika hubungan suami istri. Di Pengadilan Agama, di mana prinsip-prinsip agama mendominasi, perubahan nilai sosial sering kali menjadi landasan persidangan.

Tradisi patriarki yang mewarnai pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga mengalami tantangan seiring pergeseran nilai sosial. Wanita semakin menuntut peran yang setara dalam hubungan, mengubah paradigma tentang tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam Pengadilan Agama, pemahaman mendalam terhadap perubahan ini diperlukan untuk menafsirkan hukum keluarga sesuai dengan konteks sosial yang berkembang.

Perubahan dalam norma sosial juga memengaruhi persepsi terhadap cerai dan bertahan dalam pernikahan. Masyarakat yang semakin terbuka terhadap pemikiran bahwa perceraian bukanlah kegagalan pribadi melainkan pilihan hidup yang sah, memperkenankan pandangan yang lebih toleran terhadap pasangan yang memutuskan berpisah. Ini menciptakan tekanan pada Pengadilan Negeri untuk menciptakan keputusan yang sejalan dengan perubahan ini.⁴

Perubahan nilai sosial juga tercermin dalam pandangan terhadap isu-isu seperti hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini. Pengadilan Agama harus mencermati tuntutan kesetaraan dalam hukum keluarga Islam, sementara Pengadilan Negeri seringkali dihadapkan pada isu-isu properti dan keuangan yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap perubahan nilai sosial terkait hak-hak individu.

Dalam Pengadilan Agama, keputusan seringkali didasarkan pada interpretasi yang lebih ketat terhadap hukum agama. Pergeseran nilai sosial terhadap pandangan liberal dan inklusif dalam masyarakat dapat menantang konsistensi pengadilan dalam menangani kasus-kasus perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama perlu bersikap responsif terhadap perubahan ini untuk menjaga kredibilitas dan relevansinya dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Pengadilan Negeri, di sisi lain, beroperasi di bawah kerangka hukum yang lebih umum dan cenderung mencermati perubahan nilai sosial secara progresif. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai modern tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia menjadi penting dalam mengambil keputusan yang adil dan kontekstual. Hal ini dapat menciptakan ruang bagi Pengadilan Negeri untuk menggabungkan perspektif yang lebih luas dalam menilai sengketa perceraian.

Perkembangan teknologi informasi juga memainkan peran dalam perubahan nilai sosial dan, oleh karena itu, mempengaruhi penyelesaian perceraian. Keterbukaan informasi dan konektivitas melalui media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus perceraian. Pengadilan Agama dan Negeri perlu mempertimbangkan

⁴ Syaifudin Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013. hlm, 49

dampak teknologi ini terhadap pandangan masyarakat dan bagaimana informasi ini dapat digunakan atau dimanipulasi dalam proses peradilan.

Dalam konteks Pengadilan Agama, di mana norma-norma agama menjadi landasan, interpretasi terhadap isu-isu seperti hak asuh anak yang terkait dengan kehidupan digital menjadi semakin kompleks. Pemahaman mendalam tentang teknologi dan implikasinya terhadap nilai-nilai agama menjadi penting untuk memastikan keputusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga mencerminkan relevansi terhadap kondisi sosial yang berkembang.⁵

Pengadilan Negeri, dengan kerangka hukum yang lebih umum, dihadapkan pada tantangan mengenai perlindungan privasi dan integritas informasi dalam menghadapi bukti-bukti elektronik. Perlunya memahami bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan pribadi dan mengapa informasi ini menjadi relevan dalam persidangan adalah esensial untuk menilai dampak perubahan nilai sosial di era digital.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak hanya mencerminkan perubahan dalam nilai sosial tetapi juga memerlukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Keberhasilan kedua jenis pengadilan dalam menanggapi perubahan ini akan menentukan efektivitas mereka dalam menyelesaikan sengketa perceraian di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Perubahan nilai sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika keluarga dan penyelesaian perceraian, khususnya dalam konteks mediasi di Pengadilan Agama dan Negeri. Fenomena ini mencerminkan pergeseran budaya, pandangan masyarakat, dan norma-norma yang dapat memengaruhi bagaimana konflik keluarga diatasi dan dikelola dalam sistem hukum. Untuk memahami implikasi perubahan nilai sosial terhadap dinamika keluarga dalam proses mediasi perceraian, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek kunci.

Perubahan nilai sosial sering kali mencerminkan evolusi pandangan masyarakat terhadap pernikahan, perceraian, dan peran gender. Masyarakat yang semakin terbuka dan inklusif mungkin memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap perceraian, melihatnya sebagai sebuah pilihan hidup yang sah dan bukan lagi sebagai stigmatisasi sosial. Dalam konteks ini, mediasi dapat menjadi alat yang lebih dihargai dan diinginkan, memungkinkan pasangan untuk mengatasi perbedaan mereka dengan cara yang lebih damai dan terfokus pada kepentingan bersama.

Perubahan nilai sosial juga dapat mencerminkan pergeseran dalam konsep keluarga dan tanggung jawab orang tua. Masyarakat yang lebih modern mungkin mengapresiasi model keluarga yang lebih inklusif dan beragam, di mana kedua orang tua dapat berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan lingkungan keluarga. Dalam mediasi perceraian, hal ini dapat mempengaruhi cara pembagian tanggung jawab dan hak asuh anak, dengan fokus pada kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Di samping itu, perubahan nilai sosial juga mencakup pergeseran dalam pandangan terhadap hak-hak individu dan kebebasan pribadi. Masyarakat yang semakin menyadari hak-hak individu dapat menekankan pentingnya memberikan otonomi kepada setiap anggota keluarga dalam proses perceraian. Mediasi di Pengadilan Agama dan Negeri dapat menjadi platform yang lebih kondusif untuk mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak tanpa harus menghadapi proses peradilan yang panjang dan konfrontasional.⁶

⁵ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991. hlm, 66

⁶ Endraswara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014. hlm, 79

Perubahan nilai sosial juga dapat menimbulkan tantangan. Misalnya, nilai-nilai yang bersifat tradisional mungkin masih berakar kuat dalam beberapa keluarga dan masyarakat, yang dapat menghambat proses mediasi. Pemahaman yang berbeda terkait peran gender, tanggung jawab keluarga, dan pandangan terhadap perceraian dapat menciptakan kesenjangan persepsi yang perlu diatasi dalam upaya mencapai kesepakatan.

Aspek agama juga memainkan peran penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama. Perubahan nilai sosial yang berkaitan dengan interpretasi agama dan norma-norma moral dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perceraian dan upaya mediasi. Oleh karena itu, mediator dalam konteks ini perlu memahami kerangka nilai agama yang berlaku dan mencari solusi yang menghormati nilai-nilai tersebut.

Implikasi perubahan nilai sosial terhadap dinamika keluarga dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama dan Negeri mencakup berbagai aspek kompleks. Mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi konflik keluarga dalam masyarakat yang terus berubah, tetapi juga memerlukan pendekatan yang cermat terhadap perbedaan nilai dan pandangan yang mungkin muncul. Dengan memahami secara komprehensif perubahan nilai sosial, sistem hukum dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan ruang bagi solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian perceraian.

Perubahan nilai sosial adalah fenomena yang mendalam dan kompleks, mencerminkan transformasi dalam pola pikir, norma, dan pandangan masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, perceraian, dan keluarga. Dalam konteks penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama dan Negeri, perubahan ini dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika keluarga dan proses mediasi.

Salah satu aspek kunci perubahan nilai sosial adalah evolusi pandangan masyarakat terhadap institusi pernikahan dan perceraian. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin terbuka terhadap keragaman model keluarga dan memandang perceraian sebagai bagian alami dari kehidupan manusia, bukan lagi sebagai tanda kegagalan atau stigmatisasi sosial. Dalam beberapa kasus, perubahan ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan hak-hak individu untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi.

Mediasi perceraian di Pengadilan Agama dan Negeri memainkan peran krusial dalam menanggapi pergeseran nilai-nilai tersebut. Mediasi memberikan ruang bagi pasangan yang bercerai untuk berbicara tentang perbedaan mereka, mengeksplorasi opsi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan mencapai kesepakatan yang bersifat kolaboratif. Dalam masyarakat yang lebih menerima perceraian sebagai pilihan hidup yang sah, mediasi dapat dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan kurang konfrontasional dibandingkan dengan jalur peradilan tradisional.⁷

Perubahan nilai sosial tidak bersifat seragam di seluruh masyarakat. Beberapa komunitas atau keluarga mungkin masih mempertahankan nilai-nilai tradisional terkait pernikahan dan perceraian, yang dapat menciptakan ketegangan dalam proses mediasi. Mediator di Pengadilan Agama dan Negeri perlu memahami kerangka nilai yang berlaku dalam kasus-kasus tertentu dan beradaptasi dengan kebutuhan dan ekspektasi klien mereka.

Perubahan nilai sosial juga mencakup pergeseran dalam konsep keluarga dan tanggung jawab orang tua. Masyarakat yang semakin modern cenderung menghargai

⁷ Kartono, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017. hlm, 55

model keluarga yang lebih inklusif, di mana kedua orang tua memiliki peran aktif dalam pembentukan dan pemeliharaan lingkungan keluarga. Dalam konteks mediasi perceraian, hal ini dapat mempengaruhi bagaimana tanggung jawab dan hak asuh anak dibagikan antara kedua orang tua.

Mediator di Pengadilan Agama dan Negeri harus mempertimbangkan dinamika ini ketika membantu pasangan untuk merumuskan perjanjian terkait anak-anak. Keberlanjutan hubungan orang tua-anak dan pemenuhan kebutuhan anak-anak harus tetap menjadi fokus utama, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang mungkin memengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran orang tua.

Perubahan nilai sosial juga mencakup aspek individualisme dan hak-hak individu. Masyarakat yang semakin menyadari hak-hak individu cenderung menilai pentingnya memberikan otonomi kepada setiap anggota keluarga, termasuk dalam konteks perceraian. Dalam mediasi, pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak, sambil tetap mengutamakan kepentingan bersama, dapat lebih mudah diterima dalam masyarakat yang menganut nilai-nilai individualisme.

Perubahan ini juga dapat menimbulkan tantangan. Konflik dapat muncul ketika nilai-nilai tradisional bertentangan dengan aspirasi individu untuk kebebasan pribadi. Mediator di Pengadilan Agama dan Negeri harus memiliki keahlian untuk menavigasi perbedaan nilai ini dan membantu pasangan menemukan titik tengah yang memadukan keinginan individu dengan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dalam beberapa kasus, perubahan nilai sosial juga dapat menimbulkan ketidaksetujuan antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda dalam satu keluarga. Generasi yang lebih tua mungkin masih mempertahankan nilai-nilai tradisional, sementara generasi yang lebih muda mungkin mengadopsi pandangan yang lebih modern. Proses mediasi di Pengadilan Agama dan Negeri harus dapat menangani dinamika ini dengan bijaksana, menciptakan ruang untuk dialog antargenerasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Aspek agama juga memainkan peran penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama. Perubahan nilai sosial yang berkaitan dengan interpretasi agama dan norma-norma moral dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perceraian dan mediasi. Mediator perlu memahami secara mendalam kerangka nilai agama yang berlaku dan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam proses mediasi, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku.

Tantangan dapat muncul ketika ada perbedaan interpretasi agama di antara pihak yang bercerai. Beberapa pihak mungkin lebih memandang perceraian sebagai opsi yang lebih dapat diterima dalam konteks agama tertentu, sementara yang lain mungkin mempertahankan pandangan tradisional yang lebih ketat. Dalam mediasi di Pengadilan Agama, mediator perlu menjadi fasilitator yang sensitif terhadap perbedaan keyakinan ini, mencari solusi yang menghormati nilai-nilai agama tanpa mengorbankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perubahan nilai sosial adalah proses yang berkelanjutan dan kompleks. Hal ini memerlukan penyesuaian kontinu dalam sistem hukum, termasuk Pengadilan Agama dan Negeri, untuk mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat. Keberhasilan mediasi dalam mengatasi perceraian terletak pada kemampuan sistem hukum untuk memahami, mengakomodasi, dan mengintegrasikan nilai-nilai baru dalam proses penyelesaian sengketa.

Implikasi perubahan nilai sosial terhadap dinamika keluarga dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama dan Negeri mencakup berbagai aspek yang kompleks. Meskipun mediasi dapat dianggap sebagai alternatif yang lebih adaptif dan

manusiawi dalam menanggapi perubahan nilai-nilai tersebut, mediator perlu menghadapi tantangan yang berkaitan dengan perbedaan nilai dan pandangan dalam masyarakat yang heterogen. Dengan memahami secara komprehensif perubahan nilai sosial, sistem hukum dapat menjadi lebih responsif dan efektif dalam memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam konteks penyelesaian perceraian.

Perubahan nilai sosial memengaruhi penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama dan Negeri. Implikasi dari perubahan ini mencakup evolusi pandangan masyarakat terhadap perceraian sebagai pilihan hidup yang sah, pengaruh terhadap tanggung jawab orang tua, dan penekanan pada hak-hak individu. Meskipun memberikan peluang untuk mediasi yang lebih manusiawi, perbedaan nilai tradisional dan modern dapat menciptakan kompleksitas dalam proses penyelesaian.

Perubahan nilai sosial memengaruhi penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama dan Negeri, menciptakan evolusi pandangan terhadap perceraian dan peran keluarga. Meskipun mediasi menawarkan solusi lebih manusiawi, perbedaan nilai tradisional dan modern dapat menciptakan kompleksitas. Dalam proses penyelesaian, penting bagi mediator untuk memahami dan menavigasi perbedaan-nilai tersebut untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Implikasi perubahan nilai sosial terhadap dinamika keluarga dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama dan Negeri melibatkan evolusi pandangan terhadap pernikahan, tanggung jawab orang tua, dan hak-hak individu. Perubahan ini menciptakan tantangan dan peluang, dengan mediasi menjadi alat yang efektif untuk mengatasi konflik keluarga dalam masyarakat yang terus berubah. Namun, mediator perlu sensitif terhadap perbedaan nilai antargenerasi, pandangan agama, dan dinamika keluarga yang beragam. Penyesuaian kontinu dalam sistem hukum diperlukan agar bisa mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial yang terus berkembang.⁸

Implikasi perubahan nilai sosial dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama dan Negeri melibatkan evolusi pandangan terhadap pernikahan, tanggung jawab orang tua, dan hak-hak individu. Meskipun mediasi dapat menjadi alat efektif dalam mengatasi konflik keluarga, mediator perlu menanggapi tantangan seperti perbedaan antargenerasi, pandangan agama, dan dinamika keluarga yang kompleks. Penyesuaian kontinu dalam sistem hukum diperlukan untuk mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial yang terus berkembang.

B. Dampak Faktor Ekonomi Dan Teknologi Terhadap Sengketa Perceraian, Serta Bagaimana Respons Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri

Dampak faktor ekonomi dan teknologi terhadap sengketa perceraian merupakan dinamika kompleks yang mempengaruhi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian konflik. Faktor ekonomi, seperti ketidakstabilan keuangan atau perubahan dalam pola karier, dapat menjadi pemicu perselisihan dalam hubungan suami istri. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam cara interaksi dan komunikasi pasangan.

Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap sengketa perceraian. Tekanan ekonomi dapat memicu konflik, terutama jika pasangan menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau jika ada ketidaksetaraan dalam kontribusi finansial. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri harus memahami konteks ekonomi

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019. hlm, 99

yang mendasari sengketa perceraian untuk mengambil keputusan yang adil terkait pembagian aset, nafkah, dan tanggung jawab finansial.⁹

Dalam Pengadilan Agama, aspek ekonomi berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam terkait nafkah, harta gono-gini, dan pembagian harta. Pengadilan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi pasangan yang bersengketa serta bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Pendekatan ini memerlukan keseimbangan antara prinsip agama dan kebutuhan praktis keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Di Pengadilan Negeri, respons terhadap dampak ekonomi mungkin lebih cenderung mengacu pada prinsip-prinsip hukum umum. Meskipun aspek-aspek seperti pembagian harta dan nafkah tetap menjadi perhatian utama, pengadilan ini dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan keputusan dengan situasi ekonomi yang berubah. Kesetaraan dan keadilan dalam pembagian harta sering menjadi fokus dalam menanggapi aspek ekonomi dalam sengketa perceraian.

Perkembangan teknologi informasi juga memainkan peran signifikan dalam sengketa perceraian. Media sosial, pesan teks, dan email dapat menjadi bukti elektronik yang memengaruhi peran dan dinamika perceraian. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri perlu memahami bagaimana teknologi merambah ke dalam kehidupan pribadi pasangan dan dampaknya terhadap komunikasi, privasi, dan keamanan.¹⁰

Dalam Pengadilan Agama, keterlibatan teknologi dalam sengketa perceraian dapat melibatkan bukti elektronik terkait perilaku atau komunikasi yang bertentangan dengan norma agama. Hakim perlu memiliki pemahaman mendalam tentang konteks digital ini dan sejauh mana hal itu dapat mempengaruhi pertimbangan hukum Islam, terutama dalam hal hak asuh anak dan hak finansial.¹¹

Pengadilan Negeri juga dihadapkan pada tantangan teknologi, terutama dalam menangani privasi dan keabsahan bukti elektronik. Respons terhadap pesan teks, email, atau aktivitas media sosial perlu memperhitungkan cara di mana teknologi ini memengaruhi interaksi dan persepsi. Perlindungan privasi dan integritas bukti menjadi esensial dalam mengevaluasi dampak teknologi pada sengketa perceraian.

Kedua jenis pengadilan harus mengakomodasi perubahan teknologi dengan memperbarui metode penyajian dan evaluasi bukti. Penyelidikan menyeluruh terhadap validitas dan keaslian bukti elektronik menjadi kunci dalam menanggapi kompleksitas teknologi informasi dalam perceraian.

Aspek psikologis pasangan juga dapat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Kehadiran media sosial dapat memperumit proses perceraian dengan menciptakan platform untuk konflik, pemantauan, dan interaksi yang bersifat negatif. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan dampak psikologis teknologi informasi terhadap pihak yang bersengketa, terutama dalam konteks keputusan hak asuh anak dan peraturan hubungan keluarga.

Dalam menghadapi dampak faktor ekonomi dan teknologi, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri harus memperbarui prosedur mereka untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat. Peningkatan kemampuan hakim dan staf pengadilan dalam memahami dinamika ekonomi dan teknologi, serta integrasi prinsip-prinsip ini ke dalam

⁹ Wirawan, *Dinamika Pernikahan dan Perceraian dalam Konteks Nilai Sosial*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020. hlm, 69

¹⁰ Rahman, *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019. hlm, 55

¹¹ Kusuma, *Aspek Psikologis Dalam Perceraian: Tantangan dan Penyelesaian*, Surabaya: Penerbit Bintang Press, 2018. hlm, 99

putusan, menjadi kunci dalam menjawab tuntutan kompleks sengketa perceraian di era modern ini. Kesenambungan pengembangan hukum keluarga dan proses peradilan perlu menjadi fokus agar pengadilan dapat menjawab tuntutan yang terus berkembang dan memberikan keadilan yang relevan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam menanggapi perubahan nilai sosial, Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan evolusi pandangan terhadap pernikahan, sementara Pengadilan Negeri harus mengakomodasi nilai-nilai modern tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Sementara itu, dampak faktor ekonomi memerlukan keseimbangan antara prinsip agama dan kebutuhan praktis keluarga di Pengadilan Agama, sedangkan Pengadilan Negeri perlu fleksibilitas untuk menyesuaikan keputusan dengan situasi ekonomi yang berubah. Respons terhadap perkembangan teknologi membutuhkan pemahaman mendalam dari kedua pengadilan terkait privasi, integritas bukti elektronik, dan dampak psikologis terhadap pihak yang bersengketa. Kesenambungan pengembangan hukum keluarga dan kemampuan pengadilan dalam memahami dinamika ekonomi dan teknologi menjadi kunci dalam menjawab tuntutan sengketa perceraian di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. cetakan ke 4, 2008.
- Salim H. HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syaifudin Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013.
- Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Wirawan, *Dinamika Pernikahan dan Perceraian dalam Konteks Nilai Sosial*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Rahman, *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Kusuma, *Aspek Psikologis Dalam Perceraian: Tantangan dan Penyelesaian*, Surabaya: Penerbit Bintang Press, 2018.
- Endraswara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kartono, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.